Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Meteran Air yang Dilakukan oleh Konsumen PDAM di Bandung

Muhammad Irham Yusuf

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Irhamm60@gmail.com

Abstract. Criminal liability in criminal law is responsibility according to criminal law. Everyone is responsible for all their actions, only their behavior causes the judge to impose a law that is accountable to the perpetrator. Counterfeiting is the process of making something counterfeit. So that from the word forgery there are perpetrators, there are goods that are counterfeited and there is a purpose of counterfeiting. The forgery of a PDAM water meter is having to put, use or order to use a water meter unit that is not marked with a valid certificate at the place of the PDAM customer, this causes losses to the PDAM. This study is intended to find out how existing law enforcement relates to counterfeiting water meters and also how to prevent unscrupulous consumers who commit acts against the law, using an empirical juridical approach, namely that in analyzing problems, it is done by combining legal materials with data. The primer obtained in the field is about the enforcement of criminal law against the crime of counterfeiting water meters. Based on this research, the rules regarding measuring instruments are regulated in Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology and Bandung Regency Regional Regulation Number 5 of 2019 concerning the Tirta Raharja Regional Public Water Company. Anticipation of prevention of criminal acts or efforts to overcome crime is divided into two, namely penal efforts and non-penal efforts.

Keywords: *PDAM, Water Meter, Forgery, Legal Metrology Law*

Abstrak. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukum yang dipertanggung jawabkan pada pelakunya. pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Pemalsuan meteran air PDAM adalah yaitu mempunyai menaruh, memakai atau menyuruh memakai satu unit meteran air yang tidak bertanda tera sah di tempat pelanggan PDAM, hal tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PDAM. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang ada terkait pemalsuan meteran air dan juga bagaimana upaya pencegahan terhadap oknum konsumen yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan meteran air. Berdasarkan penelitian ini aturan mengenai alat ukur diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja. Antisipasi penegahan tindak pidana atau upaya penanggulangan pidana dibagi menjadi dua, yaitu upaya penal dan upaya non-penal.

Kata Kunci: *PDAM, Meteran Air, Pemalsuan, UU Metrologi Legal*

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum. Salah satu perlindungan hukum adalah hukum pidana, yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak satu sama lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana.

Perusahaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan Air Bersih. Perusahaan Daerah diselenggarakan atas Azas Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan Sistem Pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Dalam rangka meningkatkan Pembinaan dan Pemantapan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dimana salah satunya berada pada Kabupaten Bandung ialah PDAM Tirta Raharja, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 539/Kep.476-Perek/2019, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.

PDAM melaksanakan pengelolaan sistem penyediaan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai persyaratan yang ditentukan, dan Pengelolaan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan pada daerah Kabupaten lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Daerah dengan daerah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Namun meninjau dari pelaku yang mengganti alat ukur meteran PAM (air) yang di lakukan oleh oknum dari konsumen, maka tindak kejahatan tersebut bias di kategorikan ke dalam kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan meteran air sebagaimana yang hendak di teliti, yakni terjadinya tindak pidana yaitu mempunyai menaruh, memakai atau menyuruh memakai satu unit meteran air yang tidak bertanda tera sah di tempat pelanggan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung. Pelaku mengganti meteran air tersebut agar meteran air tidak bisa membaca dengan pasti berapa jumlah air yang keluar atau yang digunakan. Karena

tindakannya tersebut debit air yang masuk atau digunakan oleh pelaku tidak terbaca oleh alat meteran yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM Tirta Raharja.

Pada kasus lainnya saudara MG yang ber alamat di Cikoneng, Kabupaten Bandung yang memiliki lonjakan tagihan sebesar Rp. 6,352,200 per bulan Januari 2019 hingga Mei 2019. Saudara MG beralasan bahwa ada kerusakan di meter air, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai PDAM tidak adanya indikasi kerusakan apapun pada meteran air. Kerusakan tersebut diakibatkan karena adanya kerusakan di pelampung yang mengakibatkan air tidak berhenti dan tertimbun di tempat penampungan. Setelah dilakukan mediasi PDAM akhirnya memberi kompensasi sebesar 50% dari tagihan awal namun MG keberatan yang akhirnya menggugat PDAM ke BPSK Kota Bandung.

Berdasarkan laporan tingkat kehilangan air PDAM saat ini adalah sebesar 27,26% yang idealnya adalah 20% yaitu kehilangan akibat faktor teknis maupun faktor non teknis.

Sehingga perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan meteran air serta pertanggung jawaban pidana dari pemalsuan meteran air.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang terkait dengan pemalsuan meteran air dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Meteran Air yang Dilakukan oleh Konsumen PDAM di Bandung"

Bertitik tolak pada latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan meteran air di Bandung?
2. Apakah upaya antisipasi pencegahan tindak pidana pemalsuan meteran air di Bandung?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan meteran air. Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dari pandangan - pandang dan doktrin - doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin didalam ilmu hukum, akan ditemukan ide - ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi Mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan meter air dan pendekatan dengan menelaah kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus - kasus terkait. Dengan isu yang sedang di hadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian Preskriptif. Spesifikasi penelitian ini adalah Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Meteran Air Di Bandung

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Penegakan hukum dapat dilakukan terhadap oknum konsumen PDAM, karena akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum konsumen tersebut PDAM selaku badan usaha milik daerah berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Didalam konsep pemalsuan meteran air, pelaku merekayasa alat ukur ataupun mengganti meteran air yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, air yang masuk dari keran melalui meteran air tidak terdeteksi secara akurat akibatnya pelaku mendapat keuntungan karena jumlah pemakaian air tidak sebanding dengan tahihan yang ditagihkan oleh PDAM.

Dalam melakukan pengawasan secara tidak langsung, PDAM memasang alat ukur berupa meteran air, alat tersebut bertujuan untuk memantau debit air yang masuk/yang digunakan oleh konsumen PDAM. Namun masih banyak oknum konsumen yang melakukan kecurangan, permasalahan yang timbul adalah bagaimana penerapan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan curang dengan merekayasa alat ukur/meteran.

Aturan mengenai standar alat ukur yaitu hanya ada pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, menurut penulis aturan tersebut seharusnya sudah tidak dipakai lagi karena sudah lama berlaku yaitu sejak 1981, sehingga selayaknya dilakukan pembaharuan aturan agar ada efek jera terhadap oknum konsumen.

Dijelaskan pada Pasal 27 bahwa setiap orang yang mengubah alat ukur sebagaimana mestinya, dapat di pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda setinggi – tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Menurut penulis hukuman tersebut terbilang sangat ringan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terbilang sangat kecil jika dilihat dari kurs nilai tukar rupiah, kisaran nilai tukar rupiah terhadap dollar pada tahun 1980 – maret 1983 sebesar Rp.706,00 (tujuh ratus rupiah) yang mana nilainya jika dibandingkan dengan kurs saat ini melonjak hampir 200%.

Upaya Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Meteran Air Di Bandung

Menurut National Crime Prevention Council (USA), Crime prevention is a pattern of attitude and behaviors directed at reducing the threat of crime and enhancing the sense of safety and security, to positively influence the quality of life in our society and to develop environments where crime cannot flourish. (1990) (pencegahan kejahatan adalah pola sikap dan perilaku yang diarahkan untuk mengurangi ancaman kejahatan dan meningkatkan rasa aman).

Upaya penanggulangan pidana atau kejahatan kriminal menurut Marc Ancel dibagi menjadi dua, yaitu upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya – upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan fakta kasus pemalsuan meteran air yang diderita oleh PDAM, upaya penanggulangan pidana dalam hal ini dapat ditempuh dengan upaya non-penal, yang dilakukan menggunakan tindakan preventif dimana tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (social welfare policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (criminal policy).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum difungsikan agar meminimalisir tingkat kecurangan yang dilakukan oleh konsumen dari PDAM, penegakan hukum terkait pemalsuan meteran air bisa berupa pidana denda ataupun pidana kurungan. Pemalsuan meteran air bertujuan untuk “mengelabui” meteran agar air yang dipakai tidak terbaca oleh meteran, Tindakan tersebut menimbulkan tingkat kehilangan air yang besar bagi PDAM. Tindak pidana pemalsuan meteran air diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Antisipasi penegahan tindak pidana atau upaya penanggulangan pidana dibagi menjadi dua, yaitu upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Daftar Pustaka

- [1] Ali, Z. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [3] Darmono, D. (1995). *Pokok – Pokok Filsafat Hukum :Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia (Vol. V)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Hamzah, A. (2006). *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [5] Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- [6] Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [7] Saleh, R. (1999). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- [8] Soekanto, S. (1983). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [9] Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [10] Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada.

- [11] Usmawadi. (2013). Dalam Buku Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH). Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri.
- [12] Soekanto, S dan Mamuji,S. (2010). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama.
- [13] Sambas, N dan Andriasari, D (2019). Kriminologi prespektif hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- [14] Arief, Barda N (2002) Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [15] Efendi, E (2011) Hukum Pidana Indonesi Suatu Pengantar, Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama
- [16] Lamintang, P.A.F (2001) Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan,Jakarta: Sinar Grafika.
- [17] Anisa, Putri Nur, Ramli, Tatty Aryani. (2021). *Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 111-116.
- [18] Johnson, F Alvin (2004) Sosiologi Hukum, Jakarta : Rineka Cipta
- [19] Ali, Mahrus (2001) Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika
- [20] Gunadi, Ismu (2011) Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- [21] Rahatjo, S (1986) Ilmu Hukum, Bandung : Alumni.
- [22] Masriani, Y.T (2004) Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- [23] Raharjo, S (2009) Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing.
- [24] Purnomo,B (1999) Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.